



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Ketua TPK dan Bendahara Dperiksa**

**BINTUHAN, BE** - Tim auditor Inspektur Pembantu (Irban) wilayah I Inspektorat Daerah (Irda) Kaur, kembali melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi DD Desa Geramat tahun 2018. Pemeriksaan kali ini dengan memanggil Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), Risi Aprianto dan Bendahara Desa Efrizal. Keduanya menjalani pemeriksaan di hadapan tim auditor Irban I, dengan memintai keterangan terkait penggunaan DD tahun 2018 yang lalu. Di hadapan penyidik, keduanya diperiksa tak kurang dari dua jam dicecar lebih dari 15 pertanyaan terkait dengan alokasi DD tahun 2018. "Ini tindak lanjut dari auditor yang kita lakukan kemarin, mereka kita klarifikasi," kata

Irban wilayah I, Fauzi SKM, kemarin (21/11).  
Dikatakan Fauzi, hasil dari periksaan ini nantinya akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan kepada bupati dan juga salinannya akan diserahkan kepada penyidik di Tipikor Polres Kaur. Tentunya untuk memastikan adanya indikasi kerugian negara dan juga dugaan korupsi tentu akan dilihat dari hasil LHP nantinya. Tim auditor juga akan melibatkan sejumlah pihak terutama yang berkaitan dengan penghitungan volume hingga kebutuhan lain sebelum pemeriksaan difinalkan.  
"Jadi pemeriksaan hari ini kita kross penjelasannya dengan hasil pemeriksaan kita di lapangan beberapa hari yang lalu. Sedangkan untuk mantan Kades yakni Edi Sersan Adnan memang belum kita mintai keterangan," terangnya.  
Diketahui Penyidik Polres Kaur mendapat laporan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan DD tahun 2018 yang dilakukan oleh TPK Desa Geramat Kecamatan Kinal. Dimana ada beberapa item yang tidak dikerjakan ada juga dugaan indikasi pengurangan volume; sedangkan saat ini pekerjaan terputus dan Kades tak lagi menjabat. Terkait hal itu penyidik melakukan koordinasi dan hasilnya saat dilakukan pengecekan ternyata memang DD yang nominalnya Rp 803 juta itu hanya 60 persen dicairkan sisanya tak lagi diberikan rekomendasi oleh DPMD Kaur. Hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan beberapa item yang tak di kerjakan diantaranya pembangunan gedung kantor desa, pelapis tebing dan beberapa item lain. Tahun 2018 yang lalu beberapa item yang dibangun melalui DD yakni pembangunan badan jalan sepanjang 350 meter Rp 84.595.000, pembangunan siring pasang 50 meter Rp 24.760.000, TPT 88 meter Rp 60.280.000 dan penutup siring drainase 42 meter sebesar Rp 35.850.000. sedangkan pembangunan gedung kantor desa sebesar Rp 364.759.000. (618)